

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

1.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian dari peneliti sebelumnya sangat penting untuk digunakan dan dapat digunakan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai bentuk referensi dan pendukung, menjadi bahan pertimbangan dalam penulisan untuk mengkaji sehingga penelitian ini memiliki banyak referensi dan teori. Penelitian terdahulu yang diambil dilihat dari keterkaitan dengan judul penelitian yang diambil peneliti yaitu evaluasi program CSR dalam pemberdayaan masyarakat.

Penelitian terdahulu sebagai bahan referensi diambil dari tujuh penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi dalam melakukan penelitian ini :

Tabel 0.1 Penelitian Terdahulu
Sumber : Dikelola Oleh Penulis

No	Judul Penelitian dan Penulis	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Dody Prayogo “Evaluasi Program Corporate Social Responsibility dan Community Development Pada Industri Tambang dan Migas”.	Hasil penelitian pada program pembangunan Jalan terdapat beberapa masalah yaitu pembangunan belum selesai, kualitas jalan yang dinilai masih buruk, kontrol terhadap kontraktor lemah. Sedangkan beberapa kendala yang terdapat pada program yaitu keterlibatan masyarakat yang masih kurang, pembangunan tidak diarahkan	Persamaan : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Memiliki tema yang sama tentang evaluasi program CSR. Perbedaan : Lokasi penelitian ini berada pada industri perusahaan tambang

		<p>kepada pencarian sumber air. Rekomendasi dari peneliti yaitu Koorporasi perlu kerjasama lebih formal dan terstruktur dengan PEMDA dan masyarakat agar sumberdaya dapat disatukan dan penyelesaian pembangunan dapat dipercepat. Melakukan kontrol secara berkala terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, seperti membentuk organisasi dan sistem pengelolaan air bersih berbasis masyarakat.</p>	<p>dan migas. Hasil pada penelitian ini yaitu adanya pembangunan jalan yang belum selesai dan adanya kendala pada program pembangunan prasarana air bersih.</p>
2.	<p>Ruth Carissa Harianto “Evaluasi Program <i>Corporate Social Responsibility</i> “Organic Integrated System” PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkitan Paiton”.</p>	<p>Penelitian evaluasi program <i>Corporate Social Responsibility</i> “Organic Integrated System”, peneliti menemukan bahwa hasil dari program ini adalah meningkatnya kapasitas produktivitas dan Sumber Daya Manusia. Peneliti juga menemukan adanya program partisipatif dalam perencanaan program ini serta adanya hambatan dari kepala desa dalam pelaksanaan program ini.</p>	<p>Persamaan : Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang evaluasi program CSR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.</p> <p>Perbedaan : Lokasi penelitian berada PT Pembangkit Listrik di Jawa-Bali. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat hambatan dari kepala desa dalam pelaksanaan program.</p>
3.	<p>Wahyu Eko Widodo Dkk “Mengukur Kepuasan Masyarakat Pada Program CSR di Desa Kertajaya</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa program CSR yang berjalan dinilai positif oleh masyarakat. Terbukti dengan survei yang dilakukan kepada 18 orang penerima manfaat memiliki skor akhir 3.48. Nilai</p>	<p>Persamaan : Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang evaluasi program CSR dan mengukur menggunakan</p>

	(Sebuah Analisis Menggunakan Metode <i>Sustainability Compass</i>)”.	tersebut masuk ke dalam kategori “sangat baik”. Penilaian ini diberlakukan kepada 8 program yang sudah berjalan. Setelah dianalisis menggunakan metode <i>sustainability compass</i> , ada dua kelompok yang perlu ditingkatkan programnya yaitu kelompok Turban dan Masebajaya. Metode <i>sustainability compass</i> ini digunakan sebagai tawaran kepada <i>stakeholder</i> untuk menindaklanjuti pendapat yang dihasilkan dari penelitian ini. Skema utama yang dikaji pada metode <i>sustainability compass</i> adalah <i>nature, economy, society, dan well-being</i> .	<i>sustainability compass</i> . Perbedaan : Menggunakan metode penelitian kombinasi. Lokasi CSR di Desa Kertajaya. Hasil dari penelitian ini yaitu Setelah dianalisis yaitu terdapat dua kelompok yang perlu ditingkatkan programnya yaitu kelompok turban dan masebajaya.
4.	Wiwien Kurniawati “Evaluasi Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Dalam Pendidikan Daerah Lingkaran Tambang”.	Kegiatan atau program CSR PT NNT memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan pendidikan, terutama dalam sarana dan prasarana bidang fisik, hal ini dilihat dari rerata 15,8235 dan skor yang diperoleh yaitu 97% dalam kategori maksimal. Sedangkan kontribusi dalam bidang non fisik masih berada pada kategori masih kurang, yaitu dengan perolehan rata-rata 9,0588 dan skor 55%.	Persamaan : Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang evaluasi program CSR. Perbedaan : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian berada di daerah lingkaran tambang.
5.	Baihaqi “Evaluasi Program Csr PT Socfindo Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagan Raya”.	Program CSR yang dijalankan masih pada tahap-tahap program yang bersifat <i>charity, phylantrophy</i> atau kedermawanan dan pembangunan infrastruktur, CSR saat ini belum menyentuh pada aspek peningkatan sumberdaya manusia atau peningkatan kapasitas masyarakat.	Persamaan : Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang evaluasi program CSR. Metode yang digunakan Kualitatif. Perbedaan : Lokasi penelitian dilakukan pada CSR PT Socfindo. Hasil

		<p>Kehadiran perusahaan berdampak pada sosial, yaitu konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan, dampak lainnya berupa dampak terhadap lingkungan hidup, polusi udara, kebocoran limbah dan debu.</p> <p>Dampak ekonomi belum terlihat secara signifikan, perusahaan belum sampai pada program pemberdayaan ekonomi. Respon masyarakat terhadap perusahaan menunjukkan ketidakpercayaan yang disebabkan oleh banyaknya dinamika yang ada.</p>	<p>dari penelitian ini yaitu Program CSR yang dijalankan masih pada tahap-tahap program yang bersifat charity, phylantrophy dan pembangunan infrastruktur, CSR saat ini belum menyentuh pada aspek peningkatan sumberdaya manusia atau peningkatan kapasitas masyarakat.</p>
6.	<p>Admery Rossie Uli Wanda Dkk “Evaluasi Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (Csr) PT Pilar Wanapersada Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah”.</p>	<p>Tujuan dan dasar penyusunan program <i>corporate social responsibility</i> perusahaan yang ditujukan kepada kebutuhan perusahaan, kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria evaluasi dengan persentase 73.3 %.</p> <p>Pelaksanaan program <i>corporate social responsibility</i> oleh perusahaan yang terdiri atas bidang pendidikan, bidang sosial dan budaya, bidang ekonomi, bidang lingkungan dan pemukiman telah disosialisasikan dengan baik sesuai dengan kriteria evaluasi 85 %. Hasil peranan <i>corporate social responsibility</i> dalam mendukung ketahanan ekonomi daerah sangat membantu pemerintah untuk mengembangkan daerahnya dengan baik sesuai dengan kriteria evaluasi 80 %. CSR PT Pilar Wanapersada dalam</p>	<p>Persamaan : Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang evaluasi program CSR. Metode yang digunakan kualitatif dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)</p> <p>Perbedaan : Lokasi penelitian dilakukan pada CSR PT Pilar Wanapersada. Hasil dari penelitian ini yaitu CSR di PT Pilar Wanapersada dalam mendukung ketahanan ekonomi daerah di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik dengan</p>

		mendukung ketahanan ekonomi daerah di Kabupaten Lamandau, Kalteng secara keseluruhan sudah baik (80.4 %). Sehingga dapat dilanjutkan dengan upaya peningkatan agar hasil dicapai secara maksimal.	persentase (80.4 %).
7.	Basori Sunaryo “Evaluasi dan Analisis Dampak Program Corporate Social Responsibility Badak LNG”	Secara keseluruhan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan program CSR PT Badak LNG menunjukkan parameter sangat baik. Tingkat kesesuaian antara kepuasan kinerja dengan tingkat kepentingan masyarakat masuk dalam kategori indikator sangat baik. Indikator kejelasan petugas pendamping, tanggung jawab petugas pendamping, kemampuan petugas pendamping, kesopanan petugas pendamping, dan kepastian biaya pelayanan adalah indikator yang memiliki harapan tinggi dari masyarakat penerima manfaat, dan perusahaan memiliki kinerja yang sangat baik dalam hal tersebut. Dampak positif yang diterima dari kegiatan CSR pada dimensi <i>nature, wellbeing, economy, social</i> di Kota Bontang sangat tinggi, di antaranya terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan, pemanfaatan potensi alam, peningkatan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, peningkatan kemandirian UMKM, tereksposnya kebudayaan yang ada di masyarakat, dan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan-	Persamaan : Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang evaluasi program CSR. Mengukur dengan <i>sustainability compas</i> . Metode yang digunakan kualitatif. Lokasi juga berada di Kota yang sama yaitu Bontang, Kalimantan Timur. Perbedaan : Lokasi penelitian dilakukan pada CSR PT Badak LNG. Hasil dari penelitian ini yaitu Dampak positif yang diterima dari kegiatan CSR pada dimensi <i>nature, wellbeing, economy, social</i> di Kota Bontang sangat tinggi, di antaranya terjadinya peningkatan kualitas lingkungan, pemanfaatan potensi alam, peningkatan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, peningkatan kemandirian UMKM, tereksposnya kebudayaan

		kegiatan CSR PT Badak LNG.	masyarakat, dan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan CSR Badak LNG.
--	--	----------------------------	---

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Konsep Evaluasi Program

1.2.1.1. Pengertian Evaluasi Program

Menurut Gay (1985), evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data untuk menentukan sejauh mana tujuan telah dicapai untuk membuat keputusan yang efektif. Evaluasi program adalah aktivitas investigasi yang sistematis tentang sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu objek. Pendapat lain (Denzin and Lincoln, 2000:83) mengatakan bahwa evaluasi program adalah suatu hal yang berorientasi pada sekitar perhatian dari penentu kebijakan dari penyandang dana secara karakteristik memasukkan pertanyaan penyebab tentang program mana yang telah mencapai tujuan yang diinginkan (Agustanico Dwi Muryadi, 2017:3).

Evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program telah terealisasi sesuai dengan rencana. Menurut Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971), evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan (Sugiyono, 2018:5).

Stufflebeam dan Shinkfiled menyatakan bahwa :

“Evaluation is the process of delineating, obtaining, providing descriptive and judgmental information about the worth and merit of some object’s goals, design, implementation, and impact in order to guide decision making, serve needs for accountability, promote understanding of the involved phenomena.”

Evaluasi adalah suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (*the worth and merit*) dari tujuan yang dicapai, suatu desain, implementasi dan dampak untuk membantu membuat keputusan, dalam bentuk pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena. Pada bukunya Eko Putro Widoyoko (2010: 4), menyatakan bahwa:

“Evaluation program is the process of ascertaining the decision of concern, selecting appropriate information, collecting and analyzing information in order to report summary data useful to decision makers in selecting among alternatives.”

Evaluasi program merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan untuk program selanjutnya. Selanjutnya Griffin & Nix, (1991: 3) dalam buku beliau Eko Putro Widoyoko, (2010: 4) menyatakan:

“Measurement, assessment, evaluation are hierarchical. The comparison of observation with the criteria is a measurement, the interpretation and description of the evidence is an assessment and the judgement of the value or implication of the behavior is an evaluation.”

Pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian (*assessment*), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan

kriteria-kriteria yang telah ditentukan, penilaian (*assessment*) merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu tujuan program dan bahan pertimbangan dalam proses mengambil suatu keputusan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan rancangan program yang telah disusun sebagai dasar membuat keputusan dan mengambil kebijakan untuk menyusun suatu program yang akan dibuat selanjutnya.

1.2.1.2. Tujuan Evaluasi Program

Endang Mulyatiningsi (2011: 114-115) mengatakan, tujuan dilakukan evaluasi program sebagai:

- a. Mengambil keputusan mengenai keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan. Dilihat dari tujuannya yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, maka evaluasi program dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penelitian yang evaluatif.
- b. Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Hasil evaluasi program ini penting dilakukan untuk mengembangkan program yang sama ditempat lainnya.

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009: 7) mengatakan, terdapat perbedaan antara penelitian dan evaluasi program yaitu:

- a. Pada kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh rumusan masalah karena ingin mengetahui jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pada program dan apabila tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, peneliti ingin mengetahui letak kekurangan pelaksanaan program dan apa penyebabnya. Evaluasi program merupakan penelitian evaluatif. Pada dasarnya penelitian evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari adanya kebijakan suatu program, untuk menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya yaitu menentukan kebijakan selanjutnya.
- b. Kegiatan penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang sesuatu kemudian hasilnya dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaannya ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu.

1.2.1.3. Pendekatan Evaluasi Program

Menurut Stecher, Brian M & W. Alan Davis, ada beberapa konsep tentang evaluasi dan cara melakukannya yang dinamakan sebagai pendekatan evaluasi. Istilah pendekatan evaluasi ini diartikan sebagai tujuan dan prosedur evaluasi, berikut ini adalah beberapa pendekatan evaluasi program:

a. Pendekatan *Experimental*

Pendekatan *experimental* yaitu evaluasi yang berorientasi pada penggunaan *experimental science* dalam program evaluasi. Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuan evaluasi

yaitu untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu yang mengontrol sebanyak-banyaknya faktor. Keuntungan dari pendekatan *eksperimental* adalah kemampuannya dalam menarik kesimpulan yang relatif objektif, generalisasi jawaban terhadap pertanyaan program yang bersangkutan. Sedangkan keterbatasannya kita tidak dapat mengontrol yang begitu ketat dalam keadaan yang sebenarnya (Farida Yusuf Tayibnapis, 2008: 21).

b. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*Goal Oriented Approach*)

Pendekatan ini menggunakan tujuan program adalah suatu kriteria untuk menentukan suatu keberhasilan. Evaluator mencoba mengukur sampai di mana pencapaian tujuan telah dicapai. Kelebihan menggunakan pendekatan ini terletak pada hubungan antara tujuan dan kegiatan dalam program yang melibatkan individu pada elemen khusus. Sedangkan kekurangannya yaitu kemungkinan evaluasi ini melewati konsekuensi yang tak diharapkan akan terjadi.

c. Pendekatan yang berorientasi kepada pemakai (*The User Oriented Approach*)

Evaluasi dalam pendekatan ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi. Elemen yang paling penting mungkin keterlibatan pemakai yang potensial selama evaluasi berlangsung. Evaluator dalam hal ini mencoba melibatkan orang-orang penting dan stakeholder ke dalam proses evaluasi. Kelebihan pendekatan ini adalah perhatiannya terhadap individu yang berurusan dengan program dan perhatiannya terhadap informasi yang berguna untuk individu tersebut. Kekurangan pada pendekatan ini yaitu ketergantungannya terhadap kelompok yang sama dan kelemahan ini bertambah besar pengaruhnya sehingga hal-hal lain di luar itu kurang mendapat perhatian.

Berdasarkan jenis-jenis pendekatan evaluasi di atas, pada saat memilih model-model evaluasi yang harus dipertimbangkan yaitu apakah pendekatan atau konsep sebenarnya yang dimaksud sama yaitu strategi yang akan dipakai sebagai kerangka kerja dalam melakukan evaluasi. Apa yang akan dipilih akan tergantung pada maksud dan tujuan evaluasi. Setiap pendekatan evaluasi program memiliki cara tersendiri dalam proses evaluasi program, maka seorang evaluator menyesuaikan kebutuhannya dalam pemilihan jenis pendekatan evaluasi yang akan digunakan (Farida Yusuf Tayibnapis, 2008: 22).

1.2.1.4. Model Evaluasi Program

Model-model evaluasi yang satu dengan yang lainnya memang tampak bervariasi, akan tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi. Selanjutnya informasi yang terkumpul dapat diberikan kepada pengambil keputusan agar dapat dengan tepat menentukan tindak lanjut tentang program yang sudah dievaluasi. Berikut beberapa model evaluasi program :

1. CIPP Model (Daniel Stufflebeam's)

Model evaluasi CIPP mulai dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966. Model evaluasi ini merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan sumatif terhadap objek program, proyek, produk, personalia, institusi dan sistem (Wirawan, 2012:92).

Model CIPP terdiri dari empat indikator sebagai berikut ini:

a. Evaluasi konteks (*context evaluation*)

Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Evaluasi konteks berupaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan “apa yang perlu dilakukan?”. Model evaluasi ini dilakukan sebelum program diterima. Evaluasi konteks memperoleh hasil keputusan yaitu tentang perencanaan program.

b. Evaluasi masukan (*input evaluation*)

Evaluasi ini diambil oleh para pengambil keputusan dalam memilih di antara rencana - rencana yang sudah ada, menyusun proposal pendanaan, alokasi sumber-sumber daya alam dan SDM, menempatkan staff, memberi jadwal pekerjaan, menilai rencana aktivitas dan penganggaran.

c. Evaluasi proses (*proces evaluation*)

Evaluasi proses ini berupaya untuk mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staff program melaksanakan aktivitas dan kemudian membantu kelompok pengguna yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan manfaat dari program. Evaluasi ini dilakukan ketika program sedang dilaksanakan dengan hasil keputusannya yaitu pelaksanaan program.

d. Evaluasi produk (*product evaluation*)

Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi keluaran dan manfaat untuk membantu staf menjaga upaya memfokuskan pada mencapai manfaat yang penting dan akhirnya membantu kelompok - kelompok pengguna lebih luas mengukur kesuksesan upaya dalam mencapai kebutuhan yang telah ditargetkan. Evaluasi ini dilakukan pada saat program telah dilaksanakan

dengan hasil keputusan membuat resikel antara ya atau tidak program harus di resikel.

2. ***Responsive Evaluation Model (Robert Stake's)***

Evaluasi tidak diartikan sebagai pengukuran melainkan pemberian makna terhadap sebuah realitas dari berbagai perspektif orang-orang yang terlibat, berminat dan berkepentingan dengan program. Tujuan evaluasi adalah memahami semua komponen program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka model ini kurang percaya terhadap hal yang bersifat kuantitatif. Instrumen yang digunakan pada umumnya mengandalkan observasi langsung maupun tidak langsung dengan interpretasi data yang impresionistik. Langkah-langkah kegiatan evaluasi meliputi observasi, merekam hasil wawancara, mengumpulkan data, mengecek pengetahuan awal (*preliminary understanding*) dan mengembangkan desain atau model.

Kelebihan model ini adalah peka terhadap berbagai pandangan dan kemampuannya mengakomodasi pendapat yang ambigu atau tidak fokus. Sedangkan kekurangannya yaitu (1) pembuat keputusan sulit menentukan prioritas (2) tidak mungkin menampung semua sudut pandang dari berbagai kelompok (3) membutuhkan waktu dan tenaga.

Evaluator harus dapat beradaptasi dengan lingkungan yang diamati. Penilaian itu dapat berarti bila dapat mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang dari semua orang yang terlibat, yang berminat dan yang berkepentingan dengan program.

Evaluators tak percaya ada satu jawaban untuk suatu evaluasi program ini yang dapat ditemukan dengan menggunakan tes, kuesioner, atau analisis statistik. Setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya secara unik, dan evaluator mencoba menolong menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskannya atau menguraikan kenyataan melalui pandangan orang-orang tersebut. Tujuan evaluator adalah berusaha mengerti urusan program melalui berbagai sudut pandangan yang berbeda.

Menurut Scheirer (2000) bagi evaluator untuk memainkan peran lebih besar dalam pengukuran kinerja: "Para evaluator bisa menjadi 'navigator' untuk membantu seseorang mendapatkan informasi lebih untuk ukuran kinerja mereka".

Evaluasi responsif ditandai dengan ciri-ciri penelitian yang kualitatif, naturalistik. Evaluator mengandalkan observasi langsung dan tak langsung terhadap kejadian dan interpretasi data yang impresionistik. Kelebihannya pada evaluasi ini adalah ada kepekaan terhadap berbagai titik pandangan, dan kemampuannya mengakomodasi pendapat. Pendekatan responsif dapat beroperasi pada situasi yang terdapat banyak perbedaan minat dan kelompok yang berbeda-beda. Kekurangannya adalah sukar untuk membuat prioritas, atau penyederhanaan informasi untuk pemegang keputusan dan kenyataan yang praktis dan tidak mungkin menampung semua sudut pandangan dari berbagai kelompok.

3. **Goal Based *Evaluation Model***

Evaluasi ini merupakan evaluasi mengenai pengaruh objektif yang ingin dicapai oleh suatu program. Evaluator melakukan evaluasi untuk mengetahui pengaruh yang sesungguhnya dari operasi program. Pengaruh program yang sesungguhnya mungkin berbeda atau lebih banyak dari tujuan yang dinyatakan dalam program. Suatu program dapat mempunyai tiga jenis pengaruh yaitu :

- a. Pengaruh positif yang ditetapkan oleh tujuan suatu program. Suatu program mempunyai tujuan yang ditetapkan oleh rencana program. Tujuan program merupakan apa yang akan dicapai atau perubahan yang diharapkan dengan layanan atau perlakuan program.
- b. Pengaruh sampingan yang negatif yaitu pengaruh sampingan yang tidak dikehendaki oleh program.
- c. Pengaruh sampingan positif yaitu pengaruh positif program diluar pengaruh positif yang ditentukan oleh tujuan program.

4. **Formatif-summatif *Evaluation Model***

Scriven menyebutkan tanggung jawab utama dari para evaluator adalah membuat keputusan. Akan tetapi harus mengikuti peran dari penilaian yang bervariasi. Scriven mencatat sekarang ada dua peran penting yaitu formatif, untuk membantu dalam mengembangkan kurikulum dan sumatif yaitu untuk menilai manfaat kurikulum yang telah mereka kembangkan dan penggunaannya. Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki suatu program. Sedangkan evaluasi

formatif dilaksanakan pada saat implementasi program sedang berjalan. Fokus evaluasi terdapat pada kebutuhan yang dirumuskan oleh karyawan atau orang-orang dalam program. Evaluator merupakan bagian dari program dan kerja sama dengan orang-orang dalam program. Strategi pengumpulan informasi mungkin juga dipakai tetapi penekanan pada usaha memberikan informasi yang berguna secepatnya untuk perbaikan program.

Evaluasi formatif memberikan umpan balik secara terus-menerus untuk membantu pengembangan suatu program dan memberikan perhatian yang luas terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar isi validitas, tingkat penguasaan kosa kata, keterbacaan dan hal lainnya. Secara keseluruhan evaluasi formatif adalah evaluasi dari dalam yang menyajikan suatu perbaikan atau meningkatkan hasil yang telah dikembangkan. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menilai manfaat suatu program sehingga dari hasil evaluasi akan dapat ditentukan suatu program tertentu akan diteruskan atau dihentikan. Pada evaluasi sumatif difokuskan pada variabel-variabel yang dianggap penting bagi sponsor program maupun pihak pembuat keputusan. Evaluator luar atau tim review sering dipakai karena evaluator internal dapat mempunyai kepentingan yang berbeda. Waktu pelaksanaan evaluasi sumatif terletak pada akhir pelaksanaan program.

Evaluasi sumatif mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah produk tersebut lebih efektif dan lebih kompetitif. Evaluasi sumatif dilakukan untuk menentukan bagaimana akhir dari suatu program kebermanfaatan dan juga keefektifan program. Menurut (Purwanto, 2009:28) bahwa evaluasi

formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan pada saat sistem masih dalam pengembangan yang penyempurnaannya terus dilakukan atas dasar hasil evaluasi. Sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan setelah sistem sudah selesai menempuh pengujian dan penyempurnaan (Agustanico Dwi Muryadi, 2017:10). Pemilihan model evaluasi yang akan digunakan tergantung pada tujuan evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi program pembelajaran keterampilan memasak digunakan pendekatan system. Pendekatan system adalah pendekatan yang dilaksanakan dalam mencakup seluruh proses pendidikan yang dilaksanakan.

1.2.2. Model Evaluasi CIPP

Ketika mengevaluasi program pemberdayaan tanaman obat peneliti memilih model CIPP. Model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Model evaluasi CIPP dalam pelaksanaannya lebih banyak digunakan oleh para evaluator, hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam, dkk (1967) di Ohio State University. CIPP merupakan singkatan dari :

a. *Context Evaluation* (Evaluasi Konteks)

(Stufflebeam, 1983 : 128) dalam Hamid Hasan menyebutkan, tujuan evaluasi konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluasi. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan ini, evaluator akan dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan.

b. *Input Evaluation* (Evaluasi Masukan)

Tahap kedua dari model CIPP merupakan evaluasi *input* atau masukan. Evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternative apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen dari evaluasi masukan meliputi : 1) Sumber daya manusia, 2) Sarana dan peralatan pendukung, 3) Dana atau anggaran dan 4) Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

c. *Process Evaluation* (Evaluasi Proses)

Menurut Worthen & Sanders (1981 : 137) dalam Eko Putro Widoyoko dijelaskan bahwa, evaluasi proses menekankan pada tiga tujuan :

“ 1) *do detect or predict in procedural design or its implementation during implementation stage*, 2) *to provide information for programmed decision*, and 3) *to maintain a record of the procedure as it occurs* “.

Evaluasi proses digunakan untuk memprediksi rancangan prosedur atau rancangan pelaksanaan selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah dilakukan.

Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa saja yang perlu diperbaiki. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi proses dalam model evaluasi CIPP menunjuk pada “apa” (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” (*when*) kegiatan itu akan selesai. Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan

yang dilaksanakan didalam program dan apakah sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

d. *Product Evaluation* (Evaluasi Produk/Hasil)

Menurut Sax (1980 : 598) dalam Eko Putro Widoyoko memberikan pengertian evaluasi produk/hasil adalah “ *to allow to project director (or teacher) to make decision of program* “. Dari evaluasi hasil/produk diharapkan dapat membantu anggota yang diberdayakan dan staff untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir, maupun modifikasi program. Sementara menurut Farida Yusuf Tayibnapi (2000 : 14) dalam Eko Putro Widoyoko menerangkan, evaluasi produk untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. Dari pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi inilah seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluasi apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan modifikasi, atau bahkan dihentikan.

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP merupakan sasaran evaluasi yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Model CIPP berorientasi pada suatu keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*). Tujuannya adalah untuk membantu didalam membuat keputusan. Menurut Stufflebeam, (1993: 118) dalam Eko Putro Widoyoko mengungkapkan bahwa the CIPP “*approach is based on the view that the most*

important purpose of evaluation is not to prove but improve". Konsep tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi untuk memperbaiki

1.2.3. Corporate Social Responsibility (CSR)

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dalam publikasinya *Making good Business Sense* mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas (Yusuf Wibisono, 2007:9).

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa CSR adalah komitmen perusahaan dalam bertindak secara etis dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi dan sosial kepada seluruh *stakeholder*-nya serta memerhatikan lingkungan sekitar perusahaan dengan baik agar tercapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Jadi dengan kata lain penerapan CSR ini merupakan investasi yang tidak terlihat bagi perusahaan yang menerapkannya, karena apabila penerapan CSR dapat berhasil dilakukan maka citra baik perusahaan akan tetap terjaga di mata para *stakeholdernya* sehingga perusahaan nantinya akan semakin maju dan berkembang dengan dukungan yang kuat dari para stakeholder yang telah merasakan hasil dari pengimplementasian program CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep yang masih terus berkembang sehingga CSR memiliki beraneka ragam definisi. Belum ada definisi tunggal serta kriteria spesifik mengenai konsep CSR dikarenakan implementasi dan penjabaran CSR yang dilakukan perusahaan juga berbeda-beda (Sumardiyono, 2007:37).

1.2.4. SDGs



Gambar 0.1 SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Berbeda dari pendahulunya *Millennium Development Goals (MDGs)*, SDGs

dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs. Tidak Meninggalkan Satu Orangpun merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

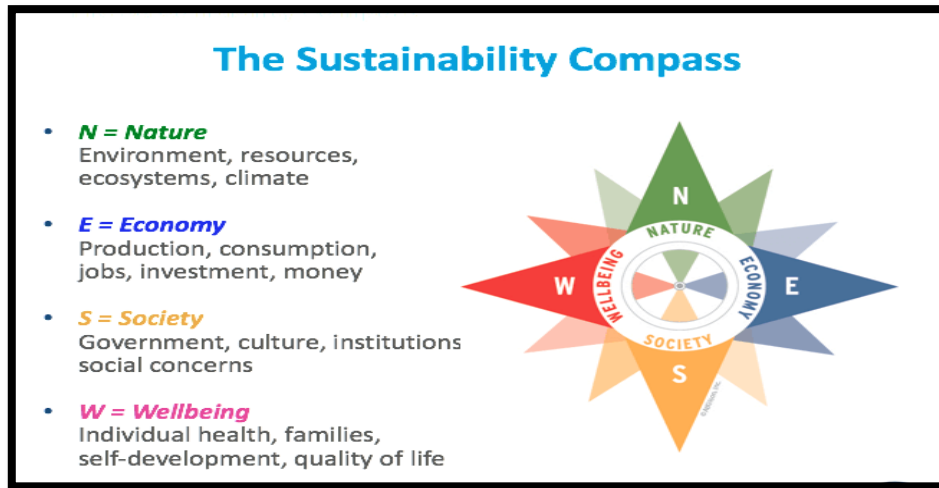
Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan SDGs yaitu Pertama, tanpa kemiskinan dengan pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Kedua, tanpa kelaparan dengan tujuan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera bertujuan menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Keempat, pendidikan berkualitas bertujuan memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Kelima, kesetaraan gender untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Kelima, air bersih dan sanitasi layak bertujuan untuk menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

Tujuan SDGs keenam, Energi bersih dan terjangkau untuk memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern

untuk semua. Ketujuh, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua. Kedelapan, Industri, inovasi dan infrastruktur untuk membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi. Kesembilan, berkurangnya kesenjangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Kesepuluh, kota dan komunitas berkelanjutan untuk membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Kesebelas, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab bertujuan untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Keduabelas, penanganan perubahan iklim untuk mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Ketigabelas, ekosistem laut untuk perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Keempatbelas, ekosistem daratan bertujuan mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. Kelimabelas, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh untuk mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Ketujuhbelas, kemitraan untuk mencapai tujuan untuk menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan (Crowther, Seifi, & Moyeen, 2018).

1.2.5. Sustainability Compass



Gambar 0.2 Indikator pada *sustainability Compass*

Compass Sustainability atau kompas keberlanjutan adalah sebuah *tool* untuk mengelola indikator dan penilaian dan *stakeholder* yang membutuhkannya. *North* (Utara), *East* (Timur), *South* (Selatan), *West* (Barat) di representasikan sebagai *Nature* (Alam), *Economy* (Ekonomi), *Society* (Masyarakat) dan *Wellbeing* (Kesejahteraan). Kompas keberlanjutan dikembangkan oleh Alan AtKisson dan sekarang telah digunakan di seluruh dunia. Perusahaan menggunakan Kompas untuk menyatukan dan mengkomunikasikan sistem pengelolaan keberlanjutan perusahaan mereka dan untuk menilai kemajuan strategis mereka. Kompas menggabungkan alat komunikasi yang sederhana dan efektif dengan pendekatan yang lebih baru terhadap ilmu pengukuran keberlanjutan, sehingga bisa ditemukan jalan menuju tujuan keberlanjutan dan memudahkan dalam proses pengambilan suatu keputusan.

Konsep ini dikembangkan oleh Alan AtKisson, dan mengacu pada karya perintis teori keberlanjutan seperti Herman Daly dan Donella Meadows. Secara garis besar kita dapat menggunakan konsep *sustainability compass* ini untuk :

1. Menjelaskan keberlanjutan dalam bahasa yang lebih mudah dicerna dan sederhana
2. Menjelaskan keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan, secara keseluruhan sistem
3. Menyediakan simbol pemersatu untuk program pembangunan berkelanjutan dan keberlanjutan
4. Mempertemukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan mengelola keterlibatan mereka dalam inisiatif keberlanjutan
5. Mengembangkan indikator dan laporan keberlanjutan untuk organisasi, perusahaan, kota dll.
6. Melakukan penilaian keberlanjutan dan analisis kesenjangan untuk perusahaan

Aspek -aspek yang terdapat pada kompas ini adalah sebagai berikut :

1.2.5.1. *Nature* (Alam)

Alam mengacu pada sistem ekologi dan sumber daya alam, contoh yang dapat mencakup tingkat keanekaragaman hayati, habitat dan kesehatan ekosistem, kualitas lingkungan dan polusi, pengelolaan sumber daya alam, estetika, kesadaran alam, apresiasi dan keaksaraan ekologis, antara lain. Membuat produk berbahan plastik , tentu saja harus mempertimbangkan apakah mendukung keberlanjutan alam, apakah bahan tersebut akan merusak alam atau tidak . Semua hal tersebut harus dipertimbangkan oleh *stakeholder*. **Indikator** pada *nature* (alam) yaitu alam lingkungan, sumberdaya, ekosistem dan iklim (Alan At-kitson, 2011:110).

1.2.5.2. *Economy* (Ekonomi)

Ekonomi adalah proses dimana sumber daya dipekerjakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan dan dibutuhkan manusia. Dimensi kompas ini dapat mencakup hal-hal seperti pekerjaan, upah, pasar, produksi dan konsumsi, energi, penelitian dan pengembangan, investasi, pendapatan dan hutang, distribusi, dll. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat supaya dapat menyokong perekonomian negara dan dapat menyejahterakan masyarakat. **Indikator** pada *economy* (Ekonomi) yaitu Produksi, konsumsi, pekerjaan, Investasi dan uang (Alan At-kitson, 2011:112).

1.2.5.3. *Society* (Masyarakat)

Masyarakat adalah dimensi kolektif dan institusional peradaban manusia, menggabungkan segala sesuatu mulai dari pemerintah hingga sistem sekolah

hingga norma sosial mengenai keadilan dan banyak hal. Hal-hal seperti warisan budaya, kohesi antar kelompok, tata kelola, hukum, kebijakan, infrastruktur, sistem pendidikan, pelayanan publik, dan banyak lagi dapat jatuh ke dalam dimensi ini.

Society (Masyarakat) menurut Alan At-kitson adalah dimensi kolektif dan institusional peradaban manusia, yang menggabungkan segala sesuatu mulai dari pemerintah hingga sistem sekolah hingga norma sosial mengenai keadilan dan banyak hal. Hal-hal seperti warisan budaya, kohesi antar kelompok, pemerintahan (tata kelola dan kebijakan) infrastruktur, sistem pendidikan. **Indikator** *society* dalam *sustainability compass* yaitu pemerintah, institusi, budaya, dan masalah sosial (Alan At-kitson, 2011:115).

1.2.5.4. Well-being (Kesejahteraan)

Kesejahteraan mengacu pada kepuasan dan kebahagiaan orang-orang, kesehatan fisik dan sosio-emosional, kesehatan mereka secara keseluruhan, tingkat kepuasan hidup pribadi, hubungan utama mereka dan peluang mereka untuk mengembangkan potensi penuh mereka. **Indikator** kesejahteraan dalam *sustainability compass* yaitu kesejahteraan individu, kesehatan keluarga, pengembangan diri dan kualitas hidup (Alan At-kitson, 2011:120)..

1.2.6. Pemberdayaan Masyarakat

1.2.6.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan atau *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan dan terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan ini. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa :

Konsep;pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh;mereka terhadap ”proses dan hasil-hasil pembangunan.”Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya mampu atau berdaya. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan

adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk meningkatkan serta mengembangkan potensi tersebut agar menjadi nyata. Pemberdayaan merujuk kepada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan dalam berbagai hal, yaitu :

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, bukan hanya bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut (Eddy Ch. Papilaya, 2001: 1) dalam buku pengembangan masyarakat Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini

mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat "people-centered", participatory, empowering, and sustainable. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekadar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekadar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*).

1.2.6.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Hikmat (2006: 135) tujuan pemberdayaan merujuk pada keadilan atau hasil yang ingin dicapai oleh sosial masyarakat berdaya, memiliki kemampuan atau pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan keselamatan, sosial, sosial, sosial seperti kepercayaan diri, mampu mewujudkan aspirasi, memiliki mata pencaharian dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan atas dasar kesadaran dari setiap individu untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya. Mardikanto dan Soebianto (2017: 122) Mengemukakan "pemberdayaan" sebagai implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis masyarakat. Mengacu pada konsep-konsep pemberdayaan, maka tujuan pemberdayaan diperlukan beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Perbaikan pendidikan, pemberdayaan di rancang sebagai bentuk pendidikan yang lebih baik.
2. Perbaikan aksesibilitas yang lebih baik, dengan tumbuh dan berkembangnya pembelajaran yang berkelanjutan, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitasnya. Utamanya aksesibilitas tentang informasi dan inovasi.

3. Perbaikan kelembagaan dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan.
4. Perbaikan tindakan dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik.
5. Perbaikan Lingkungan dengan perbaikan pendapatan yang diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial.
6. Perbaikan pendapatan dengan adanya perbaikan bisnis yang dilakukan. Tujuannya agar mengembalikan penghasilan yang diperoleh.
7. Perbaikan usaha, perbaikan pendidikan, perbaikan akses dan kegiatan.
8. Perbaikan masyarakat, situasi kehidupan yang lebih baik.
9. Perbaikan kehidupan, tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang ditingkatkan, diharapkan dapat memperbaiki situasi kehidupan.

Dari uraian diatas tujuan dari pemberdayaan yaitu membantu individu untuk mengambil keputusan serta yang menentukan untuk masa depan mereka. Hal ini dapat direalisasikan dengan melakukan peningkatan kapasitas dan rasa untuk diri sendiri untuk meningkatkan daya yang diperlukan oleh mereka.

1.2.6.3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terkait empat prinsip yang sering digunakan untuk keberhasilan program pemberdayaan yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan dan keberkelanjutan (Najiati dkk, 2005: 54). Berikut penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu:

a. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, mengatur, melaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat ini perlu waktu dan proses pendampingan, maka dari itu dibutuhkan pendamping untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

b. Prinsip Kesenjangan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program- program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan atau kesejajaran dengan pengembangan berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling menerima kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan yaitu kebebasan dan mengedepankan kemampuan masyarakat atas bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan yang memungkinkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan. Mereka memiliki kemampuan untuk mengetahui, pengetahuan yang berkaitan dengan kesulitan, pengetahuan tentang lingkungan, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat. Semua itu harus digali dan dibuat sebagai modal dasar untuk proses

pemberdayaan. Bantuan dari orang lain secara materiil harus dilihat sebagai penunjang, sehingga bantuan harus dilepaskan agar masyarakat mandiri.

d. Program Berkelanjutan Masyarakat Sendiri.

Peran pendamping akan semakin berkurang, bahkan akhirnya dikembalikan, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Prinsip dari program pemberdayaan tidak lain yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, berangkat dari 4 prinsip yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan keberlanjutan. Dari ke-4 prinsip diatas program pemberdayaan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan, karena program pemberdayaan merupakan cara untuk memberikan daya pada masyarakat yang kurang berdaya.

1.2.6.4. Pendekatan Pemberdayaan

Menurut Edi Suharto pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan (*empowerment setting*) :

a. Pendekatan Mikro

Pendekatan mikro adalah pemberdayaan yang dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan konseling, *stress management* dan *crisis intervention*. Tujuan utamanya yaitu membimbing dan melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

b. Pendekatan Mezzo

Pendekatan mezzo adalah pemberdayaan yang dilakukan kepada sekelompok klien, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai

media intervensi, pendidikan, pelatihan dan dinamika kelompok. Biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang telah dihadapi.

c. Pendekatan Makro

Pendekatan makro adalah pendekatan yang disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*). Karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas, perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, dan manajemen konflik merupakan beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri (Edi Suharto, 2003:66-67).

1.2.7. Tanaman Obat

Tanaman obat adalah suatu jenis tanaman yang sebagian, seluruh tanaman, dan (sel) tanaman tersebut digunakan sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-obatan. Tanaman obat terbagi atas tiga kelompok sebagai berikut :

1. Tanaman obat tradisional adalah jenis tanaman yang dipercaya masyarakat mempunyai khasiat obat dan telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional.
2. Tanaman obat modern adalah jenis tanaman yang secara ilmiah telah dibuktikan mengandung senyawa atau bahan bioaktif yang berkhasiat obat dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis.

3. Tanaman obat potensial adalah jenis tanaman yang mengandung senyawa atau bahan bioaktif berkhasiat obat, tetapi belum dibuktikan penggunaannya secara medis (Prapti : 2003:12).

Penggunaan tanaman obat bisa dengan cara diminum, ditempel, untuk mencuci, bahkan digunakan mandi dan dihirup sehingga penggunaannya dapat memenuhi konsep kerja reseptor sel dalam menerima senyawa kimia atau rangsangan. Hingga saat ini, pengobatan tradisional masih diakui keberadaannya dikalangan masyarakat luas. Salah satu pengobatan tradisional yang sedang trend saat ini adalah ramuan tanaman obat secara empirik yaitu ramuan tradisional dengan tanaman obat paling banyak digunakan oleh masyarakat. Penggunaan ramuan tradisional tidak hanya untuk menyembuhkan suatu penyakit, tetapi juga untuk menjaga dan memulihkan kesehatan seseorang (Stepanus, 11: 2011).

Kelebihan dari pengobatan menggunakan tanaman obat secara tradisional tersebut yaitu tidak adanya efek samping yang ditimbulkan seperti yang terjadi pada pengobatan kimiawi. Obat-obatan tradisional selain menggunakan bahan ramuan dari berbagai tumbuh-tumbuhan tertentu yang mudah didapat di sekitar perkarangan rumah kita sendiri, juga tidak mengandung resiko yang membahayakan bagi pasien dan mudah dikerjakan oleh siapa saja baik dalam keadaan mendesak sekalipun. Bagian-bagian tanaman obat tertentu yang bisa digunakan sebagai obat, yaitu Akar (radix) misalnya pacar air dan cempaka, rimpang (rhizome) misalnya kunyit, jahe, temulawak, umbi (tuber) misalnya bawang merah, bawang putih, teki, bunga (flos) misalnya jagung, piretri dan cengkeh, buah (fruktus) misalnya delima, biji (semen) misalnya saga, pinang,

jamblang dan pala, kayu (lignum) misalnya secang, bidara laut dan cendana jenggi, kulit kayu (cortex) misalnya kayu manis dan pulosari, batang (cauli) misalnya kayu putih dan turi, daun (folia) misalnya saga, ketepeng, pegagan dan sembung dan seluruh tanaman (herba) misalnya sambiloto dan meniran.

Salah satu prinsip kerja obat tradisional adalah reaksinya yang lambat (namun bersifat konstruktif) tidak seperti obat kimia yang bisa langsung bereaksi (tapi bersifat destruktif/ atau merusak). Hal ini karena obat tradisional bukan senyawa aktif. Obat tradisional berasal dari bagian tanaman obat yang diiris, dikeringkan dan dihancurkan. Tentu saja proses tersebut membutuhkan waktu lama dan bahan baku dalam jumlah yang sangat banyak (Herdiani, 11: 2012).



1.3. Landasan Teori



Gambar 0.3 Jim Ife

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan konsep pemberdayaan dari Jim Ife. Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni: konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu: perspektif pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.

a. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain. Upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong mereka dengan pembelajaran, menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan

main). Oleh karena itu, di-perlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu bagaimana bersaing di dalam suatu peraturan (*how to compete within the rules*).

b. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis yaitu suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi kaum elite seperti para tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya dan lainnya. Membentuk aliansi dengan kalangan elite, melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi, dan parlemen.

c. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis yaitu suatu agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminasi. Umumnya, masyarakat menjadi tidak berdaya lantaran adanya sebuah struktur sosial yang mendominasi dan menindas mereka, baik karena alasan kelas sosial, gender, ras atau etnik. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental serta berupaya menghilangkan penindasan struktural.

d. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis yaitu suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas, aksi atau praksis. Dari perspektif ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis.

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Jim Ife, mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka:

- a. Kekuatan atas pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.
- b. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
- c. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik.
- d. Kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan,

keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya,

- e. Kekuatan sumber daya ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi.
- f. Kekuatan dalam kebebasan produksi. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses produksi (Ife, Jim, 1997: 60-62).

Faktor lain yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat di luar faktor ketiadaan daya (*powerless*) adalah faktor ketimpangan. Ketimpangan yang sering kali terjadi di masyarakat meliputi:

- a. Ketimpangan struktural yang terjadi di antara kelompok primer, seperti perbedaan kelas seperti antara orang kaya (*the have*) dengan orang miskin (*the have not*) dan antara buruh dengan majikan; ketidaksetaraan gender; perbedaan ras maupun perbedaan etnis yang tercermin pada perbedaan antara masyarakat lokal dengan pendatang dan antara kaum minoritas dengan mayoritas.
- b. Ketimpangan kelompok akibat perbedaan usia, kalangan tua dengan muda, keterbatasan fisik, mental dan intelektual, masalah gay-lesbi, isolasi geografis dan sosial (ketertinggalan dan keterbelakangan).
- c. Ketimpangan personal akibat faktor kematian, kehilangan orang-orang yang dicintai, persoalan pribadi, dan keluarga (Ife, Jim, 1997: 63-64).

Ada tiga strategi yang diterapkan untuk pemberdayaan masyarakat, di antaranya adalah:

1. Perencanaan dan kebijakan (*Policy and planning*)

Untuk mengembangkan perubahan struktur dan institusi sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber kehidupan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Perencanaan dan kebijakan yang berpihak dapat dirancang untuk menyediakan sumber kehidupan yang cukup bagi masyarakat untuk menyediakan sumber kehidupan yang cukup bagi masyarakat untuk mencapai keberdayaan.

2. Aksi sosial dan politik (*social dan political action*)

Diartikan agar sistem politik yang tertutup dapat diubah sehingga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sispol. Adanya keterlibatan masyarakat secara politik membuka peluang dalam memperoleh kondisi keberdayaan.

3. Peningkatan kesadaran dan pendidikan

Masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu seringkali tidak menyadari penindasan yang terjadi pada dirinya. Kondisi ketertindasan diperparah dengan tidak adanya skill untuk bertahan hidup secara ekonomi dan sosial. (Ife, Jim, 1995: 63).

Oleh karena itu, kegiatan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat akan berjalan efektif jika sebelumnya sudah dilakukan investigasi terhadap faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan sosial. Dalam konteks ini, perlu diklarifikasi apakah akar penyebab ketidakberdayaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui tanaman obat di Kelurahan Loktuan Kota Bontang, berkaitan dengan faktor kelangkaan sumber daya atau faktor ketimpangan, ataukah kombinasi antara keduanya.

Upaya memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah dapat dilakukan dengan tiga strategi. Pertama, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kedua, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. Ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka (Ife, Jim, 1997: 63-64).

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu masyarakat kelurahan loktuan terutama ibu-ibu hanya menjadi ibu rumah tangga (pengangguran) dan kurangnya keterampilan. CSR PT Pupuk Kaltim memberikan *power* (daya) atas *disadvantaged* (ketimpangan) tersebut melalui pemberdayaan masyarakat melalui tanaman yang sampai saat ini masih berjalan. Perperktif pemberdayaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu perspektif pluralis, suatu proses pemberdayaan untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong mereka dengan pembelajaran, menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya

sistem (aturan main). Oleh karena itu, di perlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Oleh karena itu, kegiatan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat akan berjalan efektif jika sebelumnya sudah dilakukan investigasi terhadap faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan sosial.

Pemberdayaan masyarakat jika dikaitkan dengan teori pemberdayaan Jim Ife yaitu dengan adanya pemberdayaan tanaman obat dari CSR PT Pupuk Kaltim dengan tujuan memberikan “daya” atau (power) pada masyarakat khususnya ibu-ibu yang mayoritas tidak memiliki penghasilan (ibu rumah tangga) yang berada di Kelurahan Loktuan Kota Bontang. Bentuk pemberdayaan tanaman obat yang dilakukan oleh CSR PT Pupuk Kaltim kepada masyarakat yaitu melalui pemberdayaan tanaman obat atau disebut dengan program makrifah herbal.